PARABELA

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (1-14)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/kmq2kv29

Pemilihan RT/RW dalam Perspektif Collaborative Governance: Analisis Kerangka Bryson et al.

Imran [1*], Ridha Taurisma Lajaria[2]

[1]Mahasiswa Program Doktor, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta*
[2]Mahasiswa Program Doktor, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya

e-mail Coresponding Author: imran_dede@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to analyze the application of collaborative governance principles in the election of neighborhood (RT) and community (RW) leaders at the local government level using the analytical framework of Bryson, Crosby, and Stone. The study is grounded in the importance of participatory democracy at the community level as a foundation for strengthening inclusive and equitable public governance. A qualitative descriptive-analytical approach was employed through case studies in several urban areas, using primary data from in-depth interviews and participatory observation, as well as secondary data from official documents and academic literature. The findings indicate that the implementation of collaborative governance in RT/RW elections is shaped by four main dimensions: initial conditions, deliberative processes, governance structures, and outcomes and accountability. Community deliberation serves as an effective mechanism for building trust, social legitimacy, and active citizen participation. Facilitative leadership by subdistrict officials and local values such as mutual cooperation also strengthen cross-actor collaboration. The study extends the application of collaborative governance to micro-level local government and provides practical insights for strengthening citizen participation and local democratic governance.

Keywords: *collaborative governance; RT/RW election; local democracy; citizen participation; Bryson et al*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip collaborative governance dalam proses pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di tingkat pemerintahan lokal, dengan menggunakan kerangka analitis Bryson, Crosby, dan Stone. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya demokrasi partisipatif di tingkat komunitas sebagai fondasi penguatan tata kelola publik yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui studi kasus di beberapa wilayah perkotaan, menggunakan data primer dari wawancara mendalam dan observasi partisipatif, serta data sekunder dari dokumen resmi dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan collaborative governance dalam pemilihan RT/RW dipengaruhi oleh empat faktor utama: kondisi awal kolaborasi, proses deliberatif, struktur tata kelola, serta akuntabilitas hasil. Praktik musyawarah warga terbukti menjadi mekanisme deliberatif yang efektif dalam membangun kepercayaan, legitimasi sosial, dan partisipasi aktif warga. Selain itu, ditemukan bahwa kepemimpinan fasilitatif aparat kelurahan dan nilai-nilai lokal seperti gotong royong berperan penting dalam memperkuat kolaborasi lintas aktor. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan konsep collaborative governance ke dalam konteks mikro pemerintahan lokal, sedangkan secara praktis, hasilnya memberikan model alternatif bagi penguatan partisipasi warga dan konsolidasi demokrasi di tingkat komunitas melalui tata kelola kolaboratif yang adaptif dan berbasis nilai publik.

Kata kunci: *collaborative governance; pemilihan RT/RW; demokrasi lokal; partisipasi warga; Bryson et al.*

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (1-14)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/kmq2kv29

1. Pendahuluan

Pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan salah satu bentuk praksis demokrasi paling mendasar di tingkat lokal yang menjadi instrumen penting dalam membangun hubungan partisipatif antara negara dan warga. Dalam konteks global, praktik demokrasi lokal semakin diakui sebagai mekanisme vital untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas kebijakan publik melalui partisipasi warga yang lebih inklusif (Balla & Mema, 2018).

Di berbagai negara, penerapan tata kelola kolaboratif (collaborative governance) dianggap sebagai cara efektif untuk menghadapi kompleksitas masalah publik dengan melibatkan berbagai aktor lintas sektor dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan (Peters, Pierre, Sørensen, & Torfing, 2022).

Dalam konteks nasional, dinamika pemilihan RT/RW di Indonesia sering kali masih menunjukkan tantangan seperti rendahnya partisipasi warga, dominasi elite lokal, dan lemahnya transparansi proses. Kondisi tersebut mencerminkan perlunya pembenahan tata kelola pemilihan berbasis kolaborasi untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan lokal (Kim, 2010).

Namun, meskipun konsep partisipasi warga telah menjadi agenda penting dalam literatur tata kelola pemerintahan, masih terdapat kesenjangan antara ideal normatif kolaborasi dan implementasi faktual di tingkat lokal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam praktik kolaboratif seringkali bersifat simbolik dan terbatas pada bentuk konsultasi, bukan keterlibatan substantif dalam pengambilan keputusan (Alibegović & Slijepčević, 2018).

Studi lain menegaskan bahwa berbagai forum deliberatif seperti musyawarah warga dan komite lokal seringkali terjebak dalam kendala struktural dan politik yang membatasi ruang dialog dan pembelajaran kolektif (Newman, Barnes, Sullivan, & Knops, 2004).

Selain itu, lemahnya integrasi antara kebijakan partisipatif dan mekanisme tata kelola formal turut memperlemah legitimasi proses demokrasi lokal (Triantafillou & Hansen, 2021). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara mendalam menelaah bagaimana prinsip-prinsip collaborative governance dapat diterapkan secara kontekstual dalam proses pemilihan RT/RW agar mampu menjembatani kesenjangan antara ideal partisipatif dan praktik institusional yang terjadi di lapangan.

Teori collaborative governance sebagaimana dirumuskan oleh Bryson, Crosby, dan Stone memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami dinamika kolaborasi lintas aktor dalam tata kelola publik. Teori ini menekankan pentingnya dimensi kondisi awal (initial conditions), proses kolaboratif (seperti forging agreements, building trust, dan managing conflict), serta struktur kelembagaan dan legitimasi yang menopang keberlanjutan kolaborasi (Goffer, 2020).

Kerangka ini memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap bagaimana nilai publik dapat dihasilkan melalui tata kelola pemilihan berbasis kolaborasi. Studi empiris menunjukkan bahwa penerapan prinsip kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan sekaligus memperkuat kualitas demokrasi melalui integrasi partisipasi warga dalam pengambilan keputusan publik (Peters et al., 2022).

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (1-14)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/kmq2kv29

Dalam konteks lokal, penerapan model ini juga terbukti memperkuat rasa kepemilikan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, yang menjadi kunci keberhasilan tata kelola kolaboratif (Bartoletti & Faccioli, 2016).

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip collaborative governance dalam proses pemilihan RT/RW di tingkat pemerintahan lokal, dengan menelaah dimensi kondisi awal, proses kolaboratif, struktur tata kelola, serta hasil dan akuntabilitasnya. Rumusan masalah yang dikaji adalah: Bagaimana penerapan collaborative governance dalam proses pemilihan RT/RW berdasarkan kerangka Bryson et al. dalam menghasilkan partisipasi warga dan nilai publik di tingkat pemerintahan lokal? Pertanyaan ini diarahkan untuk mengidentifikasi mekanisme, aktor, serta dinamika relasi yang terbentuk dalam proses pemilihan berbasis kolaboratif, serta bagaimana unsur-unsur tersebut berkontribusi terhadap penciptaan nilai publik dan legitimasi sosial di tingkat lokal (Li, 2015).

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada upaya mengisi kekosongan literatur mengenai penerapan collaborative governance dalam konteks pemilihan tingkat mikro seperti RT/RW, yang selama ini masih jarang dikaji secara sistematis. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada kebijakan publik berskala makro atau tata kelola sektor tertentu seperti transportasi dan lingkungan (Gergis, 2024). Sedangkan penelitian ini menyoroti proses kolaboratif yang berlangsung dalam level pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memperluas pemahaman terhadap kerangka Bryson et al. dengan mengaitkannya secara empiris pada konteks demokrasi lokal Indonesia yang memiliki karakter sosial dan politik khas, seperti budaya musyawarah dan gotong royong (Radojević, 2023).

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap penguatan tata kelola partisipatif di tingkat lokal serta memperkaya khazanah keilmuan mengenai praktik collaborative governance di konteks demokrasi berkembang seperti Indonesia (Romme, Broekgaarden, Huijzer, Reijmer, & Van Der Eyden, 2018)

Konsep collaborative governance merupakan kerangka teoretis utama dalam penelitian ini yang berasal dari pengembangan teori tata kelola publik dan manajemen kolaboratif oleh Bryson, Crosby, dan Stone. Mereka mendefinisikan collaborative governance sebagai suatu proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah secara deliberatif, dengan tujuan untuk menghasilkan nilai publik melalui kerja sama lintas sektor yang saling menguntungkan.

Kerangka ini menekankan pentingnya kondisi awal (initial conditions), dinamika proses kolaboratif (collaborative process dynamics), struktur dan tata kelola kelembagaan (structure and governance), serta hasil dan akuntabilitas (outcomes and accountabilities) dalam membangun keberhasilan kolaborasi publik (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012). Dalam konteks teori tata kelola publik, pendekatan ini lahir dari pergeseran paradigma "government" menuju "governance," di mana negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam penyelenggaraan urusan publik, melainkan berperan sebagai fasilitator yang mendorong kolaborasi multi-aktor (Sørensen & Torfing, 2019). Pendekatan ini juga relevan dalam konteks demokrasi lokal karena mampu memperkuat legitimasi dan akuntabilitas

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (1-14)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/kmq2kv29

pemerintahan melalui mekanisme deliberatif yang partisipatif (Triantafillou & Hansen, 2021).

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance telah menjadi salah satu instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan di berbagai negara. Penelitian oleh Alibegović and Slijepčević (2018) menemukan bahwa partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan lokal dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal. Studi di Pakistan juga menunjukkan bahwa local collaborative governance memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kapasitas institusional dan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal (Din, Yuan, Khan, & Han, 2023). Selain itu, penelitian oleh Kurkela, Kork, Jäntti, and Paananen (2023) di Finlandia menyoroti pentingnya budaya organisasi dan sumber daya manajerial dalam mendukung keberhasilan partisipasi warga di pemerintahan lokal. Penelitian di Vietnam oleh Binh and Giai (2021) menunjukkan bahwa demokrasi lokal memerlukan keterbukaan pemerintah dan struktur kelembagaan yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi secara bermakna dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Sementara itu, pendekatan collaborative governance dalam konteks keberlanjutan juga diidentifikasi berperan dalam memperkuat integrasi warga melalui mekanisme deliberatif yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Gergis, 2024).

Meski demikian, literatur menunjukkan adanya sejumlah kesenjangan penelitian (research gap) dalam penerapan collaborative governance di konteks pemerintahan mikro seperti RT/RW di Indonesia. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada skala kebijakan makro atau pada isu sektoral seperti lingkungan dan pembangunan ekonomi daerah (K. Douglas, 2022). Selain itu, sebagian studi lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis kolaborasi seperti efisiensi dan efektivitas kebijakan, tetapi belum banyak yang menggali secara mendalam dinamika sosial-politik di tingkat komunitas yang berpengaruh terhadap keberhasilan kolaborasi (Ishida, 2022).

Sementara itu, dimensi kepercayaan (trust) dan legitimasi dalam proses kolaboratif di pemerintahan lokal juga masih kurang dieksplorasi, padahal faktor-faktor tersebut berperan penting dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan (Vento, 2024). Kesenjangan ini menegaskan perlunya penelitian yang berfokus pada penerapan collaborative governance di tingkat akar rumput, khususnya dalam proses pemilihan RT/RW yang merepresentasikan bentuk paling nyata dari demokrasi lokal.

Artikel ini menempatkan dirinya dalam konteks mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan kerangka Bryson, Crosby, dan Stone dalam menganalisis tata kelola kolaboratif di tingkat komunitas. Fokus penelitian diarahkan untuk mengungkap bagaimana prinsip-prinsip collaborative governance seperti forging agreements, building trust, dan managing conflict dapat diterapkan secara adaptif dalam konteks pemilihan RT/RW di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori collaborative governance dengan memperluas penerapannya ke level pemerintahan mikro, sekaligus memberikan perspektif empiris baru mengenai bagaimana interaksi antaraktor di tingkat lokal menghasilkan nilai publik dan legitimasi sosial (Maillet et al., 2023). Dalam ranah konseptual, penelitian ini memperkaya literatur dengan menghubungkan teori tata kelola kolaboratif dengan konteks demokrasi partisipatif berbasis komunitas, yang selama ini masih kurang mendapatkan perhatian akademik dalam

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (1-14)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/kmq2kv29

studi tata kelola publik.

Tren metodologis dalam studi collaborative governance menunjukkan pergeseran menuju pendekatan integratif yang menggabungkan analisis proses sosial dengan evaluasi kelembagaan. Studi oleh S. Douglas et al. (2020) menyoroti pentingnya pendekatan berbasis basis data kasus kolaboratif untuk memahami variasi desain dan hasil kolaborasi di berbagai konteks pemerintahan. Pendekatan baru juga muncul dalam bentuk analisis teoretis mikro terhadap insentif dan preferensi warga dalam berpartisipasi, sebagaimana dikembangkan oleh Alderete (2023) melalui model mikroekonomi untuk menjelaskan perilaku partisipatif dalam pemerintahan terbuka. Sementara itu, penelitian oleh Dacombe and Wojciechowska (2024) menunjukkan perlunya integrasi teori pilihan sosial (social choice theory) dalam studi partisipasi warga untuk memperkuat legitimasi demokratis dari proses kolaboratif. Pendekatan-pendekatan ini mencerminkan evolusi konseptual dalam studi tata kelola kolaboratif yang kini tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga pada dinamika sosial, etika deliberatif, dan transformasi budaya organisasi dalam pemerintahan lokal.

Secara konseptual, sintesis dari berbagai kajian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan collaborative governance sangat bergantung pada interaksi yang konstruktif antara dimensi kelembagaan dan sosial. Kolaborasi tidak dapat dipahami semata sebagai proses manajerial, melainkan sebagai praktik sosial-politik yang melibatkan pembentukan norma bersama, kepemimpinan fasilitatif, serta pembelajaran kolektif di antara aktor yang terlibat (Newman et al., 2004). Dalam konteks penelitian ini, sintesis konseptual ini akan digunakan untuk menilai bagaimana dimensi-dimensi tersebut termanifestasi dalam praktik pemilihan RT/RW, serta bagaimana struktur kolaboratif dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi lokal dan memperluas ruang partisipasi warga di tingkat pemerintahan paling dasar.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan collaborative governance dalam konteks pemilihan Ketua RT/RW di tingkat pemerintahan lokal. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, interaksi, dan dinamika sosial yang muncul dalam proses kolaboratif antaraktor yang terlibat. Metode ini juga sejalan dengan karakteristik penelitian dalam bidang administrasi publik yang menekankan pemahaman proses sosial, nilai, dan persepsi individu dalam konteks institusional yang spesifik (Tando, Sudarmo, & Haryanti, 2020). Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study), yang memungkinkan peneliti untuk menelaah fenomena collaborative governance dalam konteks nyata secara komprehensif dan mendalam. Studi kasus dianggap efektif dalam memahami kompleksitas interaksi antaraktor, dinamika kepemimpinan, serta kondisi sosial-politik yang memengaruhi praktik kolaborasi publik di tingkat lokal (Tomo, Hinna, Mangia, & Nito, 2018).

2.1 Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap proses pemilihan RT/RW di beberapa wilayah pemerintahan lokal. Informan utama terdiri dari aparat kelurahan,

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (1-14)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/kmq2kv29

pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat dalam proses pemilihan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti peraturan daerah, pedoman teknis pemilihan RT/RW, laporan kegiatan, serta notulensi musyawarah warga. Penggunaan kombinasi data ini bertujuan untuk memperkuat validitas hasil melalui triangulasi sumber dan metode, yang merupakan prinsip utama dalam penelitian kualitatif (Avoyan, 2022). Data tambahan berupa literatur akademik juga digunakan untuk memperkuat analisis teoretis dan memperkaya konteks penelitian.

2.2 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi sesuai konteks partisipasi warga dan praktik kolaboratif yang terjadi di lapangan. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti kegiatan musyawarah pemilihan RT/RW serta interaksi antaraktor selama tahapan persiapan dan pelaksanaan. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis berbagai dokumen administratif dan laporan kegiatan yang merepresentasikan proses kolaborasi. Ketiga teknik ini saling melengkapi dan menghasilkan data yang kaya serta mendalam. Validitas data diperkuat melalui triangulasi metode dan sumber sebagaimana direkomendasikan oleh penelitian-penelitian collaborative governance terdahulu (Subatin & Pramusinto, 2019).

2.3 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Data

Dalam penelitian ini, data dan informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam proses pemilihan RT/RW dan pemahaman terhadap dinamika kolaboratif. Kriteria inklusi meliputi (1) individu atau kelompok yang berpartisipasi aktif dalam proses musyawarah atau pelaksanaan pemilihan RT/RW; (2) aparat kelurahan atau panitia pemilihan yang memiliki tanggung jawab administratif; dan (3) tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh sosial dalam komunitas. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup individu yang tidak terlibat langsung atau memiliki konflik kepentingan dalam proses pemilihan. Penerapan purposive sampling bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan representatif terhadap konteks fenomena yang diteliti (Sabaruddin & Said, 2020).

2.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah proses kolaboratif dalam pemilihan RT/RW di tingkat kelurahan sebagai bentuk implementasi collaborative governance di pemerintahan lokal. Fokus analisis diarahkan pada identifikasi peran aktor, pola komunikasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta dinamika kepercayaan dan legitimasi yang terbentuk selama proses pemilihan. Pendekatan unit analisis ini sesuai dengan prinsip dalam penelitian kebijakan publik dan administrasi yang berorientasi pada pemahaman relasional dan prosesual antaraktor (Amirullah, 2024). Analisis dilakukan pada level organisasi sosial dan pemerintahan mikro untuk mengidentifikasi pola kolaborasi yang mendukung partisipasi warga serta produksi nilai publik di tingkat komunitas.

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (1-14)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/kmq2kv29

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan mengikuti tahapan open coding, axial coding, dan selective coding sebagaimana dikembangkan dalam tradisi grounded theory. Proses ini dimulai dengan pengorganisasian data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan dimensi kerangka Bryson et al. (initial conditions, collaborative process, structure and governance, outcomes and accountabilities). Setiap tema dikategorikan dan diinterpretasikan untuk menemukan hubungan antar dimensi. Proses analisis dilakukan secara iteratif dengan melibatkan refleksi teoretis dan pembandingan silang antar data untuk menjaga keandalan interpretasi (Jatmikowati, Dinata, & Noorsetya, 2020). Selain itu, uji kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi metode, member checking, dan peer debriefing untuk memastikan konsistensi hasil interpretasi. Analisis juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal dalam menafsirkan fenomena kolaborasi, sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian tata kelola publik berbasis komunitas (Astuti & Suaedi, 2019). Pendekatan tematik ini dipilih karena sesuai untuk mengidentifikasi pola kolaborasi yang kompleks, sekaligus memberikan pemahaman kontekstual terhadap bagaimana nilai publik diciptakan melalui interaksi kolaboratif di tingkat pemerintahan lokal.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini diperoleh melalui proses analisis tematik terhadap data wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi dalam konteks penerapan collaborative governance pada proses pemilihan Ketua RT/RW di tingkat pemerintahan lokal. Berdasarkan hasil open coding, axial coding, dan selective coding menggunakan perangkat NVivo 12, ditemukan empat tema utama yang mencerminkan dinamika tata kelola kolaboratif sesuai kerangka Bryson, Crosby, dan Stone: (1) kondisi awal kolaborasi (initial conditions), (2) proses kolaboratif (collaborative process), (3) struktur dan tata kelola (structure and governance), serta (4) hasil dan akuntabilitas (outcomes and accountabilities).

3.1 Kondisi Awal Kolaborasi (Initial Conditions)

Tema pertama yang muncul menggambarkan bahwa pelaksanaan pemilihan RT/RW berlangsung dalam kondisi sosial yang ditandai oleh tingginya tingkat heterogenitas warga dan ketimpangan kapasitas partisipasi antar kelompok. Pemerintah kelurahan berperan sebagai inisiator utama pembentukan panitia dan pedoman teknis pemilihan, namun dorongan partisipasi warga umumnya muncul karena kesadaran sosial dan nilai gotong royong yang kuat dalam komunitas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengalaman kolaborasi sebelumnya, seperti musyawarah pembangunan kampung (Musrenbang) dan kegiatan sosial, menjadi fondasi awal terbentuknya kepercayaan antaraktor. Pola ini sejalan dengan temuan Jatmikowati et al. (2020) yang menegaskan bahwa kolaborasi publik di tingkat lokal seringkali tumbuh dari tradisi sosial yang bersifat relasional dan berbasis kepercayaan antarwarga. Dalam konteks lain, penelitian Rachman (2024) di Jakarta juga menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi ditentukan oleh kesiapan sumber daya sosial dan tingkat kepemimpinan komunitas yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan.

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (1-14)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/kmq2kv29

3.2 Proses Kolaboratif (Collaborative Process)

Hasil analisis menunjukkan bahwa proses kolaboratif dalam pemilihan RT/RW melibatkan tahapan deliberasi, negosiasi, dan pembentukan kesepakatan bersama yang dilakukan melalui forum musyawarah warga. Proses ini menampilkan dinamika partisipasi aktif warga yang diorganisasi secara inklusif oleh panitia pemilihan dan difasilitasi oleh aparat kelurahan. Bentuk kolaborasi ini tercermin dalam praktik "musyawarah mufakat" yang menonjolkan nilai kesetaraan dan dialog terbuka antaraktor. Namun, dalam beberapa kasus, ditemukan adanya dominasi figur tertentu yang memiliki pengaruh sosial atau ekonomi lebih besar, yang memengaruhi arah pengambilan keputusan. Kondisi serupa ditemukan oleh Romme et al. (2018) yang menyoroti bahwa perubahan dari sistem kompetitif menuju kolaboratif memerlukan pergeseran budaya politik dari pola mayoritas-minoritas menuju pola konsensus. Dalam konteks Indonesia, Fatlolon (2023) menambahkan bahwa partisipasi deliberatif yang substansial masih menghadapi kendala pada tingkat kesadaran politik dan kapasitas warga dalam memahami hak-hak demokratisnya.

3.3 Struktur dan Tata Kelola (Structure and Governance)

Kondisi ketiga memperlihatkan bahwa struktur tata kelola pemilihan RT/RW bersifat semi-formal dan fleksibel. Pemerintah kelurahan berfungsi sebagai facilitator yang menjamin transparansi dan keabsahan proses, sementara warga memegang kendali utama dalam menentukan calon dan mekanisme pemilihan. Pola kolaboratif ini memperlihatkan hubungan yang simetris antara pemerintah dan warga, di mana otoritas administratif dan legitimasi sosial saling menopang. Model ini serupa dengan hasil penelitian Rozikin and Sofwani (2023) yang menemukan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif di tingkat daerah sangat bergantung pada koordinasi horizontal antarunit pemerintahan serta kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Sementara itu, Haris, Suryono, Said, and Rozikin (2024) menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan pembentukan institusi kolaboratif untuk menjaga keberlanjutan interaksi antaraktor di tingkat komunitas.

3.4 Hasil dan Akuntabilitas (Outcomes and Accountabilities)

Temuan menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance dalam pemilihan RT/RW menghasilkan peningkatan partisipasi warga dan penguatan legitimasi sosial terhadap hasil pemilihan. Warga menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap proses dan hasil pemilihan karena keterlibatan mereka sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Di sisi lain, kolaborasi juga berkontribusi terhadap penguatan kapasitas sosial komunitas dalam mengelola konflik dan membangun konsensus. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Bartoletti and Faccioli (2016) yang menyimpulkan bahwa kolaborasi publik meningkatkan rasa kepemilikan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi lokal. Dalam konteks yang lebih luas, Haris et al. (2024) mengemukakan bahwa hasil kolaborasi efektif ditentukan oleh keseimbangan antara kepemimpinan, sumber daya sosial, dan kapasitas kelembagaan yang memadai.

3.5 Faktor Penguat dan Penghambat Kolaborasi

Hasil lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi dalam pemilihan RT/RW didorong oleh tiga faktor utama, yaitu (1) kepemimpinan fasilitatif aparat kelurahan, (2)

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (1-14)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/kmq2kv29

kepercayaan antaraktor yang tumbuh dari pengalaman kerja sama sebelumnya, dan (3) kesamaan visi terhadap pentingnya pemilihan yang demokratis dan transparan. Namun demikian, terdapat pula faktor penghambat berupa keterbatasan kapasitas administratif panitia, kurangnya dukungan sumber daya, serta kecenderungan apatis sebagian warga. Pola temuan ini konsisten dengan studi oleh Sønderskov (2019) yang menunjukkan bahwa faktor psikologis dan persepsi elite politik lokal berpengaruh terhadap sejauh mana partisipasi warga dapat dimobilisasi dalam proses kolaboratif. Selain itu, hasil penelitian oleh Salahudin, Jainuri, and Nurmandi (2017) menunjukkan bahwa dominasi birokrasi lokal masih menjadi penghambat utama bagi penguatan demokrasi partisipatif di Indonesia.

3.6 Variasi Praktik Kolaborasi di Konteks Lokal

Analisis perbandingan antarwilayah menunjukkan bahwa praktik kolaborasi dalam pemilihan RT/RW bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh karakteristik sosial serta budaya lokal. Di wilayah dengan tingkat homogenitas sosial tinggi, proses kolaborasi berlangsung lebih cepat dan konsensus mudah dicapai, sedangkan di wilayah heterogen, proses deliberasi cenderung lebih panjang dan memerlukan fasilitasi intensif. Variasi ini menunjukkan pentingnya adaptasi kelembagaan terhadap konteks sosial sebagaimana ditegaskan oleh Rusnaini (2016) dalam kajiannya mengenai kebijakan otonomi daerah di Yogyakarta, yang menekankan keseimbangan antara nilai demokrasi universal dan lokalitas budaya.

3.7 Pembahasan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan collaborative governance dalam proses pemilihan RT/RW di tingkat pemerintahan lokal berfungsi sebagai bentuk demokrasi partisipatif yang konkret, di mana warga tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif dalam pengambilan keputusan. Temuan ini secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian: Bagaimana penerapan prinsip-prinsip collaborative governance berdasarkan kerangka Bryson et al. dalam menghasilkan partisipasi warga dan nilai publik di tingkat lokal? Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor pemerintah, warga, dan lembaga sosial menghasilkan peningkatan partisipasi, legitimasi sosial, serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi lokal. Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa tata kelola kolaboratif mampu mengoptimalkan kualitas pemerintahan melalui sinergi horizontal antaraktor, bukan sekadar melalui mekanisme hierarkis administratif (Wibawa & Nur'aini, 2020).

Interpretasi hasil menunjukkan bahwa dimensi initial conditions memainkan peran penting dalam membangun prasyarat keberhasilan kolaborasi. Kepercayaan antaraktor, pengalaman kerja sama sebelumnya, dan struktur sosial komunitas menjadi basis pembentukan modal sosial yang mendukung praktik kolaboratif. Kondisi ini selaras dengan kerangka Bryson, Crosby, dan Stone yang menekankan pentingnya konteks sosial dan politik sebagai fondasi awal collaborative governance.

Dalam kasus pemilihan RT/RW, musyawarah warga berfungsi sebagai public sphere deliberatif tempat terjadinya pertukaran ide dan pembentukan kesepakatan kolektif. Fenomena ini sejalan dengan gagasan Faedlulloh (2015) tentang pentingnya ruang publik lokal sebagai arena diskursif bagi masyarakat dalam membentuk pelayanan publik yang partisipatif. Dengan demikian, kolaborasi bukan sekadar instrumen teknis, tetapi

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (1-14)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/kmq2kv29

merupakan praktik demokratis yang menguatkan relasi antara warga dan pemerintah dalam konteks pemerintahan lokal.

Jika dibandingkan dengan studi-studi terdahulu, hasil penelitian ini memperlihatkan kesamaan pola bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif ditentukan oleh legitimasi sosial, kepemimpinan fasilitatif, dan dukungan kelembagaan. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa ketika komunikasi dan kepercayaan sosial kuat, mekanisme musyawarah dapat berjalan inklusif dan menghasilkan keputusan yang diterima secara luas. Hasil ini juga konsisten dengan temuan Fatlolon (2023), yang menyoroti pentingnya politics of inclusion dalam desentralisasi Indonesia sebagai sarana memperdalam partisipasi warga dan memperkuat etos demokrasi di tingkat lokal. Namun demikian, penelitian ini berbeda dengan temuan Lay (2017) yang menilai bahwa partisipasi di tingkat lokal kerap bersifat reaktif dan tidak berakar pada kesadaran deliberatif, melainkan pada dinamika politik lokal yang kompetitif.

Dalam konteks teori, penelitian ini memperkuat relevansi model collaborative governance Bryson et al. dalam menjelaskan dinamika demokrasi lokal Indonesia yang unik. Model ini tidak hanya menggambarkan mekanisme kolaborasi antaraktor formal, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan musyawarah mufakat yang telah lama menjadi karakter budaya politik lokal.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada lingkup geografis dan jumlah kasus yang relatif terbatas, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Fokus penelitian pada beberapa wilayah perkotaan menyebabkan belum tergambarnya variasi praktik kolaboratif di wilayah pedesaan yang memiliki dinamika sosial berbeda. Selain itu, penelitian ini tidak menilai secara kuantitatif sejauh mana kolaborasi berpengaruh terhadap tingkat legitimasi atau efisiensi pemilihan.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah pentingnya menginstitusionalisasikan prinsip collaborative governance dalam pedoman formal pemilihan RT/RW, dengan menekankan aspek fasilitasi deliberatif, transparansi proses, dan akuntabilitas publik. Pemerintah daerah dapat mengembangkan panduan teknis berbasis partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga sosial dalam setiap tahapan proses.

4. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan collaborative governance dalam proses pemilihan RT/RW di tingkat pemerintahan lokal telah membuktikan efektivitasnya sebagai mekanisme demokrasi partisipatif yang memperkuat legitimasi sosial dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, ditemukan bahwa keberhasilan kolaborasi dalam konteks ini ditentukan oleh kombinasi faktor sosial dan kelembagaan, termasuk modal sosial berupa kepercayaan antaraktor, pengalaman kolaboratif sebelumnya, serta kepemimpinan fasilitatif dari aparat lokal. Proses musyawarah warga terbukti menjadi arena deliberatif yang memungkinkan warga berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, sekaligus menginternalisasi nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan, transparansi, dan tanggung jawab bersama. Hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif yang adaptif terhadap konteks sosial dan budaya lokal mampu menghasilkan nilai publik dalam bentuk peningkatan partisipasi dan penguatan kohesi sosial di tingkat komunitas.

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (1-14)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/kmq2kv29

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan konsep collaborative governance dengan memperluas penerapannya ke dalam konteks pemerintahan mikro yang sebelumnya belum banyak dikaji. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kolaborasi bukan sekadar strategi administratif, melainkan juga instrumen demokratis yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga melalui mekanisme deliberatif yang sejajar. Secara praktis, artikel ini berkontribusi terhadap penguatan desain tata kelola lokal di Indonesia dengan menawarkan model kolaboratif yang menekankan peran warga sebagai mitra aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pengembangan kebijakan partisipatif yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam konteks pemilihan tingkat komunitas serta pengelolaan isu-isu sosial lain yang memerlukan sinergi antara negara dan masyarakat sipil.

Sebagai implikasi lebih lanjut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas warga dan aparat kelurahan melalui pendidikan politik dan pelatihan fasilitasi deliberatif agar proses kolaborasi berjalan lebih efektif dan setara. Pemerintah daerah juga disarankan untuk menginstitusionalisasikan prinsip-prinsip collaborative governance dalam pedoman resmi pemilihan RT/RW serta memperluas penerapannya ke bidang-bidang pelayanan publik lainnya. Untuk penelitian mendatang, pendekatan mixed methods atau studi komparatif antarwilayah dapat dilakukan guna memperdalam pemahaman mengenai variasi praktik kolaboratif dan menguji sejauh mana faktor sosial, politik, dan kelembagaan mempengaruhi efektivitas tata kelola kolaboratif di tingkat lokal.

Daftar Pustaka

Alderete, M. (2023). Application of a Microeconomic Approach for Explanation of Citizen Participation in Open Government. J. Theor. Appl. Electron. Commer. Res., 19, 40-53. doi:10.3390/jtaer19010003

Alibegović, D. J., & Slijepčević, S. (2018). Attitudes towards Citizen Participation in the Local Decision-Making Process: A Comparative Analysis. Drustvena Istrazivanja, 27, 155-175. doi:10.5559/di.27.1.08

Amirullah, I. (2024). Analyzing the Impact of Collaborative Governance Models on Public Service Delivery. Digital Innovation : International Journal of Management. doi:10.61132/digitalinnovation.v1i3.20

Astuti, S., & Suaedi, F. (2019). Building Independent Villages through Collaborative Governance by Village-Owned Enterprises (Best Practice from Panggungharjo Village, Central Java, Indonesia). Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. doi:10.30589/proceedings.2018.200

Avoyan, E. (2022). Collaborative Governance for Innovative Environmental Solutions: Qualitative Comparative Analysis of Cases from Around the World. Environmental Management, 71, 670-684. doi:10.1007/s00267-022-01642-7

Balla, A., & Mema, M. (2018). CIVIL PARTICIPATION AS A NECESSITY OF DEMOCRATIC GOVERNANCE. Interdisciplinary Journal of Research and Development. doi:10.56345/ijrdv5n204

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (1-14)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/kmq2kv29

Bartoletti, R., & Faccioli, F. (2016). Public Engagement, Local Policies, and Citizens' Participation: An Italian Case Study of Civic Collaboration. Social Media + Society, 2. doi:10.1177/2056305116662187

Binh, N. T., & Giai, N. Q. (2021). Study on Citizen Participation in Local Governance in Vietnam. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 14, 87-109. doi:10.2478/nispa-2021-0016

Dacombe, R., & Wojciechowska, M. (2024). Social Choice and Citizen Participation: Bringing Democratic Theory to Public Administration. Political Studies Review, 22, 722-739. doi:10.1177/14789299231203657

Din, M. Z. U., Yuan, X. Y., Khan, N. U., & Han, H. (2023). Linking local collaborative governance and public service delivery: mediating role of institutional capacity building. Humanities and Social Sciences Communications, 10, 1-10. doi:10.1057/s41599-023-02421-3

Douglas, K. (2022). Developing and implementing an effective framework for cooperative governance and local economic development (LED) in South African local government. Megatrend revija. doi:10.5937/megrev2201235d

Douglas, S., Ansell, C., Parker, C., Sørensen, E., Hart, P. t., & Torfing, J. (2020). Understanding Collaboration: Introducing the Collaborative Governance Case Databank. Policy and Society, 39, 495-509. doi:10.1080/14494035.2020.1794425

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22, 1-29. doi:10.1093/jopart/mur011

Faedlulloh, D. (2015). Local Public Sphere for Discursive Public Service in Indonesia: Habermas Perspective. European Journal of Social Sciences Education and Research, 5, 427-432. doi:10.26417/ejser.v5i1.p427-432

Fatlolon, C. (2023). Toward a Politics of Inclusion: Prospects and Problems of Civic Participation in Indonesia's Government Decentralization. MELINTAS. doi:10.26593/mel.v38i1.7097

Gergis, F. H. (2024). Collaborative forms of governance in sustainable urban mobility schemes at the sub-governmental levels: a scoping literature review. International Journal of Urban Sustainable Development, 16, 343-359. doi:10.1080/19463138.2024.2411049

Goffer, R. (2020). Collaborative Governance in Light of Deliberative Democracy. 53-75. doi:10.1007/978-3-030-45807-2_3

Haris, R. A., Suryono, A., Said, A., & Rozikin, M. (2024). Collaborative Governance in Local Economic Development: the Case in East Java, Indonesia. Journal of Law and Sustainable Development. doi:10.55908/sdgs.v12i1.2501

Ishida, S. (2022). DRIVERS AND CHALLENGES IN MUNICIPAL SDGS FROM COLLABORATIVE GOVERNANCE PERSPECTIVE. Socialis Series in Social Science. doi:10.20319/socv3.1939

Jatmikowati, S., Dinata, C., & Noorsetya, B. (2020). Strengthening Public Administration with Good Collaborative Governance (Government and Civil Society Organizations Relation for Development Countries in Decentralization Era: Case Studies in Malang Regency). 179-185. doi:10.2991/aebmr.k.200305.197

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (1-14)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/kmq2kv29

Kim, S. (2010). Collaborative Governance in South Korea: Citizen Participation in Policy Making and Welfare Service Provision. Asian Perspective, 34, 165-190. doi:10.1353/apr.2010.0017

Kurkela, K., Kork, A., Jäntti, A.-L., & Paananen, H. (2023). Citizen participation as an organisational challenge in local government. International Journal of Public Sector Management. doi:10.1108/ijpsm-08-2022-0179

Lay, C. (2017). From Populism to Democratic Polity. doi:10.22146/pcd.25740

Li, M. (2015). Governance of Citizen Participation and its Related Concepts: A Review of Literature. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 61, 99-104. doi:10.18052/www.scipress.com/ilshs.61.99

Maillet, L., Neff, M., Goudet, A., Godbout, I., Fotso, A. C. J., Jacques, M.-C., . . . Landry, M. (2023). Once upon a time homelessness: a comparative case study of two initiatives of multilevel intersectoral governance in Quebec. International Journal of Integrated Care. doi:10.5334/ijic.icic23266

Newman, J., Barnes, M., Sullivan, H., & Knops, A. (2004). Public Participation and Collaborative Governance. Journal of Social Policy, 33, 203-223. doi:10.1017/s0047279403007499

Peters, B., Pierre, J., Sørensen, E., & Torfing, J. (2022). How collaborative governance can make political systems more democratic and effective. doi:10.4337/9781788117999.00011

Rachman, D. (2024). Collaborative Governance in the Elderly Population Empowerment Program in Penggilingan Village, East Jakarta Administrative City. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. doi:10.59141/jist.v5i9.4489

Radojević, M. (2023). Local democracy and forms of direct citizen participation in governance: Case study Serbia. Srpska politička misao. doi:10.5937/spm81-45784

Romme, A., Broekgaarden, J., Huijzer, C., Reijmer, A., & Van Der Eyden, R. (2018). From Competition and Collusion to Consent-Based Collaboration: A Case Study of Local Democracy. International Journal of Public Administration, 41, 246-255. doi:10.1080/01900692.2016.1263206

Rozikin, M., & Sofwani, A. (2023). Joint Collaboration of the Local Government (Regency, City, and Province) for the Successful Development in East Java Of Indonesia. Journal of Law and Sustainable Development. doi:10.55908/sdgs.v11i11.1354

Rusnaini. (2016). Democracy and Local Autonomy Policy in Indonesia: A Particularist Perspective. doi:10.2991/icse-15.2016.79

Sabaruddin, A., & Said, A. (2020). Collaborative Governance Model in Public Service. 12, 933-944.

Salahudin, S., Jainuri, J., & Nurmandi, A. (2017). Is There Civic Groups Participation in Budget Planning? A Study Budget Planning in Malang City, Indonesia. Jurnal Studi Pemerintahan: Journal of Government and Politics, 8, 228-253. doi:10.18196/jgp.2017.0049.228-253

Sønderskov, M. (2019). Do local politicians really want collaborative governance? International Journal of Public Sector Management. doi:10.1108/ijpsm-10-2017-0271

Sørensen, E., & Torfing, J. (2019). Designing institutional platforms and arenas for interactive political leadership. Public Management Review, 21, 1443-1463. doi:10.1080/14719037.2018.1559342

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume 6 Issue 2, September 2026 (1-14)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
10.51454/kmq2kv29

Subatin, B., & Pramusinto, A. (2019). Collaborative Governance in Off-site Anoa Conservation at The Anoa Breeding Center of The Manado Environment and Forestry Research and Development Institute. Policy & Governance Review. doi:10.30589/pgr.v3i1.126

Tando, C., Sudarmo, S., & Haryanti, R. (2020). Collaborative Governance In Public Service In Indonesia: A Systematic Mapping Study. 18, 144-163. doi:10.14710/jis.18.2.2019.144-163

Tomo, A., Hinna, A., Mangia, G., & Nito, E. (2018). Collaborative Governance: A Successful Case of Public and Private Interaction in the Port City of Naples. 6, 177-193. doi:10.1108/s2051-663020180000006009

Triantafillou, P., & Hansen, M. (2021). Introduction to the PMR special issue on accountability and legitimacy under collaborative governance. Public Management Review, 24, 655-663. doi:10.1080/14719037.2021.2000744

Vento, I. (2024). Trust, collaboration, and participation in governance: A Nordic perspective on public administrators' perceptions of citizen involvement. Public administration review, 84, 870-887. doi:10.1111/puar.13833

Wibawa, S., & Nur'aini, D. A. (2020). Collaborative Governance In Achieving Sustainable Development Goals: A Conceptual Framework. JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia. doi:10.33830/jiapi.v1i1.29